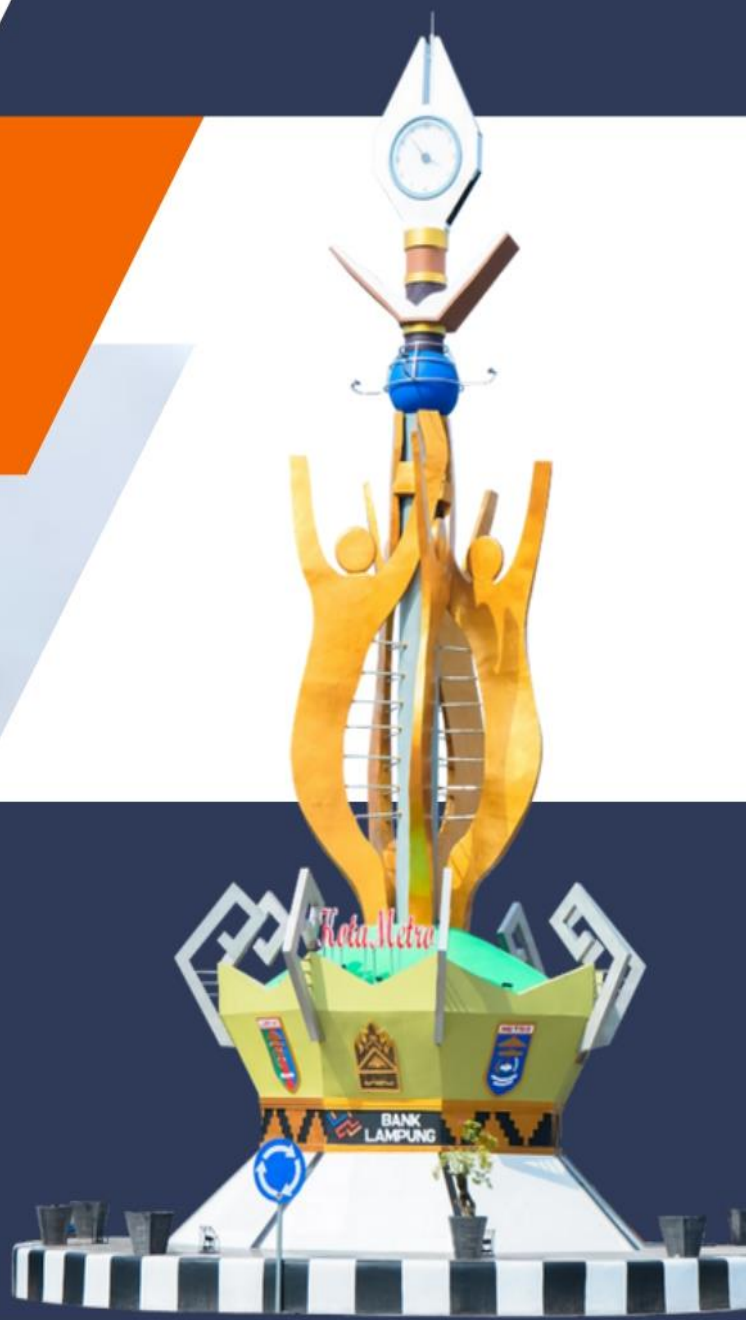




RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN METRO BARAT

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Metro Barat dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas dokumen dan pelaksanaannya. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan manfaat bagi Kota Metro.

Metro, September 2025

Camat Metro Barat,



Triyono, S.Sos.

Pembina / IV.a

NIP.19680722 199402 1 002

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.3.1 Maksud 5

1.3.2 Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH9

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 10

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 26

2.1.2.1 Sumber Daya Kecamatan Metro Barat 26

2.1.2.2 Aset / Sarana Prasarana 27

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Barat..... 27

2.1.3.1 Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Metro Barat.... 27

2.1.3.2 Kinerja Keuangan29

2.1.4Kelompok Sasaran Layanan.....32

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah..... 32

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah32

2.2.2 Isu Strategis 33

BAB III TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN 36

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah36

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....38

3.3 Strategi Keamatan Metro Barat dalam Mencapai
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah43

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Metro Barat dalam Mencapai
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah45

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja,
Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 48

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 76

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 79

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci
(IKK) 83

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Metro Barat. 25

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Metro Barat 25

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan..... 26

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Barat Tahun 2021 – 2025..... 29

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2021-2025.. 30

Gambar 2.6 Analisis Pohon Masalah Kecamatan Metro Barat 33

Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Metro Barat..... 35

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Barat..... 40

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Kecamatan Metro Barat..... 42

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Metro Barat..... 46

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Metro Barat 49

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Metro Barat 59

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Metro Barat77

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (Iku) Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030 80

Tabel 4.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030..... 81

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (Ikk)..... 83

Tabel 4.7 Formulasi Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) diharuskan menyusun rencana strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen stratejik akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara stratejik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan, mampu mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuat keputusan mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di

bawah kontrol organisasi, mampu merencanakan masalah utama organisasi, mampu merencanakan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja yang kompleks berdasarkan keahlian.

Atas dasar Hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Sejak diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan visi, misi dan Program Walikota terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program. Renstra OPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang berisikan tentang Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

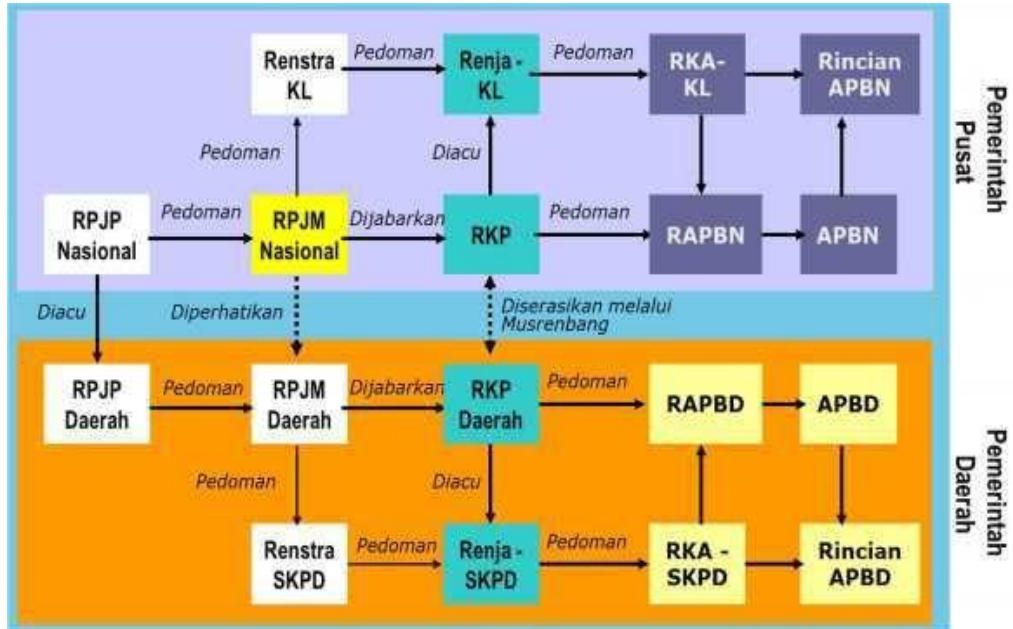
Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban dan lain-lain).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Kecamatan Metro Barat).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Metro Barat pada setiap tahunnya.

Keterkaitan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Keterkaitan Rencana Strategis OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005–2025;
 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
 4. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Metro Barat memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun yang merupakan dokumen resmi perencanaan organisasi

perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Metro Barat disusun dengan maksud :

1. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Metro Tahun 2025-2029.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Metro Barat setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Walikota Metro, sehingga melalui dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro dapat terwujud dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Metro Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro barat ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra kecamatan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEIS KECAMATAN METRO BARAT

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Metro Barat, Sumber Daya Kecamatan Metro Barat, Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Barat, Kelompok Sasaran Layanan, serta Permasalahan dan Isu Strategi Kecamatan Metro Barat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Metro Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangkai mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Barat dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEIS KECAMATAN METRO BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Geografis Kecamatan Metro Barat memiliki Luas Wilayah Kecamatan Metro Barat adalah 11,28 km persegi, dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut ;

- Kelurahan Mulyojati 3,03 Km persegi
- Kelurahan Mulyosari 2,95 Km persegi
- Kelurahan Ganjar Agung 2,88 Km persegi
- Kelurahan Ganjar Asri 2,42 Km Persegi

Ketinggian Kecamatan Metro Barat dari permukaan laut adalah 40 M dan topografi 3 m s/d 12 m. Sedangkan suhu udara rata-rata di Kecamatan Metro Barat adalah 30-35 derajat Celsius.



Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Metro Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Kecamatan Metro Pusat
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Selatan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Metro Selatan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktural

a. Tugas

Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota Metro untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya diuraikan penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Metro Barat sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. KECAMATAN

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspekn : rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- b. Penyusunan anggaran Kecamatan;

- c. Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
- d. Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mencatat, mengelola, mengirim dan menyiapkan surat menyurat;
- b. Melaksanakan tata kearsipan surat menyurat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris kecamatan;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara
- f. Menyusun kearsipan kepegawaian;
- g. Mengusulkan Karis/karsu, Karpeg, Taspen, Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan urusan kepegawaian lainnya ;
- h. Menyiapkan dan melaporkan absensi pegawai; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Membuat Rencana/Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan;
- b. Membuat Dokumen/Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Dokumen/Daftar Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengaturan kebutuhan Anggaran Kecamatan;
- d. Membuat atau menyampaikan Laporan Triwulan, Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pemerintahan, Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas, melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan, administrasi kependudukan serta keamanan dan ketertarikan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- h. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemerintahan;
- i. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- j. Melakukan upaya-upaya untuk penertiban administrasi pertanahan;
- k. Melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah bersama instansi terkait;
- l. Melaksanakan administrasi pemerintahan;

- m. Menyelesaikan kasus tanah dan melaksanakan peralihan hak-hak atas tanah;
- n. Melakukan pengawasan terhadap penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- o. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
- p. Menyiapkan bahan pembinaan keamanan dan ketertiban;
- q. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- r. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota;
- s. Menyusun dan menertibkan peraturan perundang undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan;
- t. Menyelesaikan perselisihan antar kelurahan;
- u. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
- v. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengalihan tanah-tanah bengkok dan sejenisnya;
- w. Mengelola dana bantuan kecamatan;
- x. Melaksanakan pembinaan keagrariaan, pembinaan ideology Negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan urusan pemerintahan umum;
- y. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- z. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- aa. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

- cc. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- dd. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah dilingkup wilayah kecamatan;
- ee. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- ff. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dengan aparat terkait di wilayah kecamatan;
- gg. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kecamatan; Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- hh. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
- ii. Mengambil tindakan preventif dan refresif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- jj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas yaitu melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan fisik dan pelayanan umum dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Pembangunan;

- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk bimbingan usaha peningkatan kualitas dan pelayanan transportasi daerah dan sungai di wilayah kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pengawasan dan pemeliharaan sarana pasar, sarana olah raga, obyek wisata, peribadahan, MCK, pemakaman dan telephone umum serta sarana lainnya;
- g. Menyusun rencana program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Memonitoring pelaksanaan proyek pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. Bersama instansi teknis melakukan pembinaan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung yang dibiayai pemerintah;
- j. Melakukan pengamanan terhadap gedung-gedung pemerintah yang tidak/belum dipergunakan oleh instansi/lembaga pemerintah;
- k. Mengawasi pembangunan perumahan dan pemukiman;
- l. Melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah;

- m. Menyusun rencana program pembangunan, peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. Melaksanakan Musrenbang kecamatan;
- o. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan;
- p. Merekap hasil-hasil Musrenbang kelurahan;
- q. Membuat data sarana dan prasarana umum (sarana pasar, sarana kesehatan, sarana olah raga, sarana peribadatan, pemakaman dan telephone umum serta sarana umum lainnya); dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perekonomian;
- b. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan usaha usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat produksi, jasa dan distribusi;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengembangan perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal dan pembangunan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- e. Mengupayakan peningkatan tertib administrasi dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian;

- g. Melaksanakan pemantauan pola konsumsi masyarakat;
- h. Memasyarakatkan penganekaragaman pangan dan peningkatan mutu gizi masyarakat;
- i. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksana izin usaha dan mengusulkan penutupan usaha yang melanggar peraturan;
- j. Menerbitkan perizinan sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Walikota;
- k. Merencanakan pembangunan peternakan dilingkup kecamatan;
- l. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya pertanian. Melakukan bimbingan RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan RDK/RDKK;
- m. Melaksanakan pengawasandan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga;
- n. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap kerajinan rakyat;
- o. Memberikan rekomendasi terhadap industri kecil rumah tangga yang layak mendapat bantuan;
- p. Merekomendasikan pengaturan penempatan papan reklame dan billboard;
- q. Bersama instansi teknismelakukan penertiban dan pengaturan pedagang kaki lima;
- r. Membantu mengawasi kemetrolagian UPTP;
- s. Membantu memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam rangka penanaman modal;
- t. Menyebarkan informasi mengenai potensi dan peluang investasi Kota metro;
- u. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan perkoperasian;
- v. Mendata perusahaan (BUMN/BUMD), swasta, yayasan dan koperasi yang bergerak pada

semua sektor usah yang memperkerjakan tenaga kerja;

- w. Membuat persiapan bahan perencanaan pembangunan dan sumberdaya pembangunan dibidang pertanian yang meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
- x. Melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dibidang produksi usaha tani dan pengembangan pertanian secara umum;
- y. Menyiapkan latihan penyusunan statistik pertanian kecamatan;
- z. Mengadakan supervisi ke wilayah binaan/kelompok tani;
- aa. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani;
- bb. Menyusun program rencana kerja penyuluh pertanian;
- cc. Membantu melaksanakan pengujian, survey dan evaluasi serta penyebarluasan informasi pertanian;
- dd. Membantu dan menyiapkan bahan dan arahan kebijaksanaan pembangunan penyuluhan;
- ee. Membuat dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan;
- ff. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri, koperasi, pertambangan, energi dan pengembangan kepariwisataan dan transportasi;
- gg. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan bidang industri, koperasi, pertambangan dan energi, kepariwisataan dan transportasi;
- hh. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan industri kecil, koperasi, energi dan pengembangan kepariwisataan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan

- ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewantitaan serta pembinaan kelestarian lingkungan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut: Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu pelaksanaan kegiatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- g. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedeqah;
- h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- i. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan rakyat (kesehatan, agama, urusan haji dll) serta para penyandang masalah-masalah sosial (penyandang cacat, anak terlantar, jompo, tuna karya, tuna wisma, tuna susila dll);
- j. Menyiapkan bahan bdalam rangka program

- penghijauan dan reboisasi dan penyelamatan tanah dan kerusakan alam;
- k. Menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat dan tindak kekerasan dan penyelenggaraan hak-hak azasi manusia;
 - l. Menyusun, mengkoordinasikan kegiatan Lomba-Lomba Kesrak, UKS, UKBM, BKB;
 - m. Melakukan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K); dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. KELURAHAN

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengokordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Camat dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelurahan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

1. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Menyusun rencana dan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada lurah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana penyiapan administrasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan administrasi pemerintahan dibawahnya serta administrasi kependudukan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- c. Menyusun program serta pembinaan

- adminstrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, serta pengolahan data dan pelaporan muatsi penduduk dan catatan sipil;
 - e. Membina bidang pertanahan;
 - f. Menyusun program pembinaan/pengembangan potensi (sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi) dan tertib administrasi;
 - g. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana penyiapan administrasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta membina potensi swadaya masyarakat dan menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perekonomian rakyat, pengembangan koperasi serta peningkatan pendapatn asli daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program koordinasi rencana pembangunan;
- b. Menyusun program evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
- c. Menyusun program pembinaan potensi swadaya masyarakat;
- d. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;an bidang fisik;
- e. Menyusun program pembinaan dan

- pengembangan perkoperasian, sistem arisan, perkreditan rakyat dan usaha- usaha informal serta lembaga ekonomi dan usaha bersama
- f. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

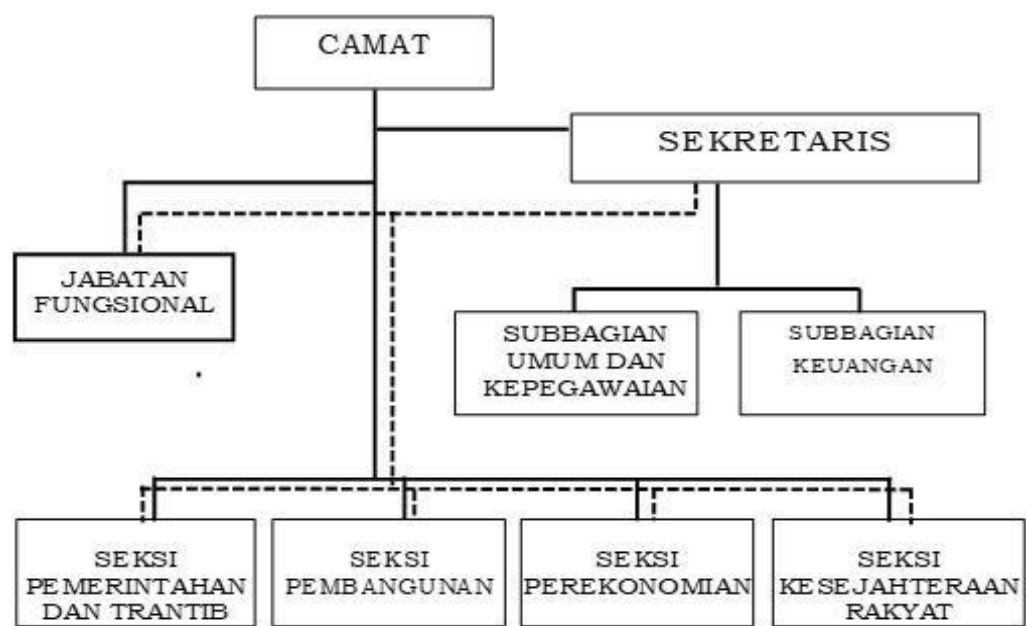
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan lingkungan hidup, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

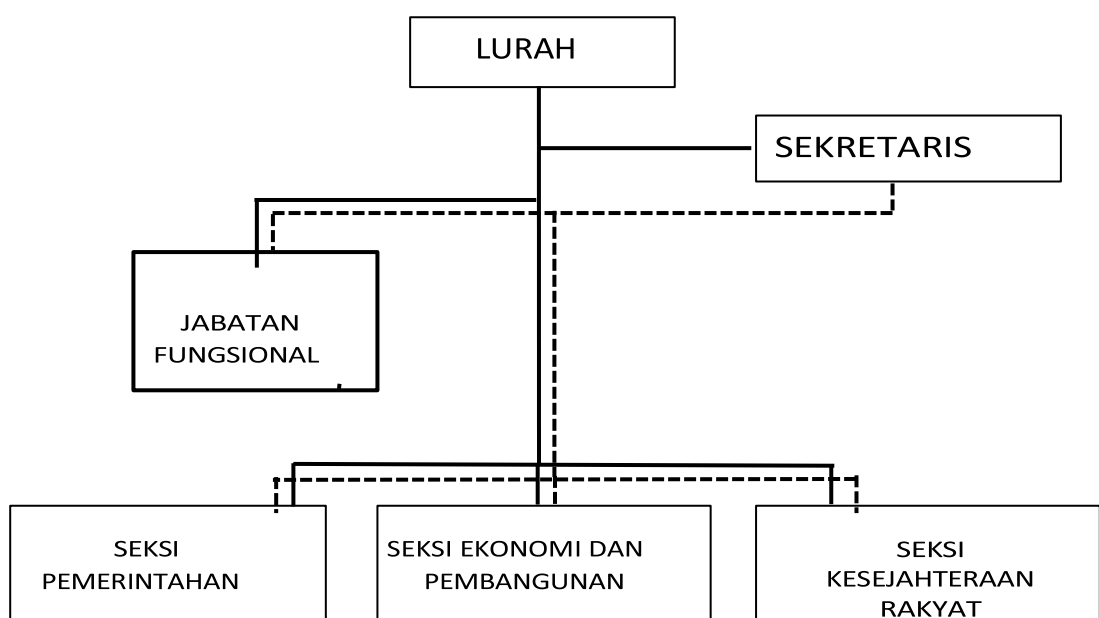
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dans/bantuan etrhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh;
- g. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia;
- h. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Metro Barat

sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Metro Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro,



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Metro Barat



2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Metro Barat

2.1.2.1. Sumber Daya Kecamatan Metro Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Metro Barat memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Pegawai Kecamatan Metro Barat saat ini terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 44 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai (PNS, PPPK dan THL) berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	Uraian	Pendidikan					Jumlah
	Pangkat/Gol. Ruang	SD/SMP	SMA	D.III	S-1	S-2	
	Kecamatan Metro Barat						
1	THL	1	7	1	2		11
2	PPPK		1		2		3
3	Gol II		2	1			3
4	Gol III		2	1	7	2	12
5	Gol IV				1	2	3
	Kel. Ganjar Agung						
1	THL		6		2		8
2	PPPK		1				1
3	Gol II		1				1
4	Gol III		1	1	3		5
	Kel. Ganjar Asri						
1	THL		6		1		7
2	Gol III				6	1	7
	Kel. Mulyojati						
1	THL		5				5
2	Gol III		3		6		9
	Kel. Mulyosari						
1	THL		4	1	1		6
2	Gol III		3	1	2		6
TOTAL		1	42	6	33	5	87

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Metro Barat Tahun 2025

2.1.2.2. Aset / Sarana Prasarana

Untuk Mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Metro Barat membutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau asset (inventaris Kantor). Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Metro Barat:

- Gedung Kantor Kecamatan : 1 unit
- Gedung Aula Kecamatan : 1 unit
- Rumah dinas Camat : 1 unit
- Kendaraan dinas roda empat : 2 unit
- Kendaraan dinas roda dua : 6 unit
- Mesin tik : 1 unit
- Komputer : 3 unit
- Printer : 4 unit
- Laptop/notebook : 4 unit
- AC : 7 unit (2 rusak)
- Televisi : 3 unit
- Filling kabinet : 64 buah
- Lemari besi : 5 buah (4 rusak)
- Lemari kayu : 7 buah
- Rak arsip : 6 buah
- Meja tulis/kerja : 26 buah
- Kursi kerja 1 biro : 10 buah
- Kursi kerja ½ biro : 14 buah
- Kursi tamu : 2 set

(Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Barat)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Barat

2.1.3.1. Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Metro Barat

- **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

Kecamatan Metro Barat . Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-kator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Kinerja pelayanan Kecamatan Metro Barat secara lebih lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
		Tahun					Tahun					Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan dikecamatan	80%	85%	90%	90%	95%	85%	85%	90%	90%	95 %	106%	100%	100%	100%	100%
	a. Administrasi kependudukan/kk	90%	95%	100%	100%	100%	94%	100%	90%	67%	75%	104%	105%	90%	67%	75%
	b. ijin UMKM	90%	95%	100%	100%	100%	94%	94%	95%	50%	78%	106%	94%	50%	50%	78%
	c. Rekomendasi IMB	90%	95%	100%	100%	100%	94%	95%	95%	14%	56%	104%	100%	95%	14%	56%
	d. Rekomendasi Nikah	90%	95%	100%	100%	100%	83%	95%	95%	17%	15%	92%	100%	95%	17%	15%
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	90%	95%	100%	100%	100%	94%	100%	90%	67%	75%	105%	105%	90%	67%	75%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan melalui ketaan membayar PBB	85%	85%	90%	90%	90%	94%	97%	98%	67%	66%	110%	114%	108%	74%	73%
4	Jumlah kegiatan sosial agama dan kemasyarakatan yang terealisasi)	46 keg	50 keg	50 keg	55 keg	55 keg	50 keg	66 keg	46 keg	33 keg	33 keg	108%	132%	92%	60%	60%

Tahun 2021 - 2025

2.1.3.2 Kinerja Keuangan

Realisasi Kinerja Keuangan Kecamatan Metro Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2021-2025

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					PERSENTASI ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,648,655,137	4,491,645,068	4,561,033,356	5,070,698,833	4,895,562,343	4,404,854,308	4,316,561,404	4,419,836,765	4,973,716,986	N/A	94.76	96.10	96.90	98.09	N/A
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	951,954,035	1,281,169,177	308,191,385	481,232,900	481,232,900	951,074,193	1,278,650,764	297,652,585	422,917,443	N/A	99.91	99.80	96.58	87.88	N/A
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	903,387,700	711,144,650	1,792,247,000	1,877,170,100	1,877,170,100	903,387,700	708,380,720	1,771,773,265	1,846,161,420	N/A	100.00	99.61	98.86	98.35	N/A

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	391,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	381,026,700	11,200,000	11,200,000	11,200,000	N/A	97.40	100.00	100.00	100.00	N/A
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	626,559,000	1,018,842,650	919,365,400	1,012,100,000	1,012,100,000	611,615,200	1,006,227,066	915,781,940	997,870,350	N/A	97.61	98.76	99.61	98.59	N/A
JUMLAH	7,521,755,872	7,514,001,545	7,592,037,141	8,452,401,833	8,277,265,343	7,251,958,101	7,321,019,954	7,416,244,555	8,251,866,199	N/A	490	494	492	483	N/A

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksana teknis kewilayahan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Metro Barat adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Barat yang menjadi fokus layanan dan pembangunan. Secara umum, kelompok sasaran ini meliputi semua warga yang tinggal di Kecamatan Metro Barat, termasuk individu, keluarga, kelompok sosial, dan organisasi masyarakat . Penyusunan Renstra Kecamatan Metro Barat juga memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, kelompok minoritas, dan kelompok dengan kebutuhan khusus.

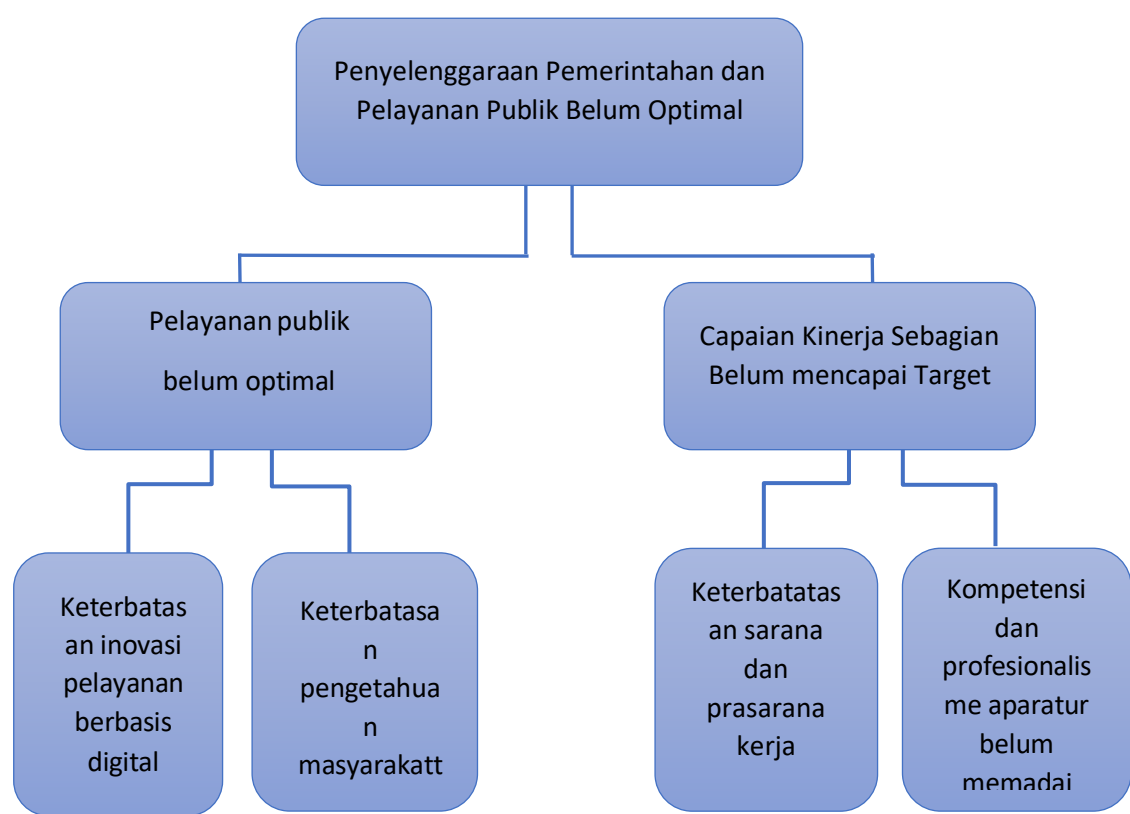
Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Metro Barat juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kecamatan. Sehingga diharapkan Renstra Kecamatan Metro Barat dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Barat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode Tahun 2021-2025 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Metro Barat telah diupayakan secara optimal, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan berikutnya. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Metro Barat disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.6
Analisis Pohon Masalah Kecamatan Metro Barat



2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap organisasi atau entitas, dan memerlukan perhatian serta penanganan yang serius untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan mengidentifikasi isu strategis, organisasi atau entitas dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah kegiatan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya

apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Isu strategis Kecamatan Metro Barat disajikan secara lengkap pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
ISU STRATEGIS KECAMATAN METRO BARAT

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Potensi pengembangan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dan digital	Pelayanan Publik di kecamatan dan kelurahan yang belum optimal; Keterbatasan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan sebagai sarana penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital; Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan dan kelurahan belum memadai, serta masih kurangnya disiplin kerja aparatur.	Mengembangkan sistem layanan informasi publik yang transparan dan mudah diakses	Terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan infrastruktur dan sumber daya keuangan yang tersedia, terutama di negara berkembang	Isu RPJMN 2025-2029: Kesenjangan Infrastruktur Logistik dan Ketersediaan Infrastruktur Sosial	Arah kebijakan pada Asta Cita 1 RPJMD Provinsi Lampung: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan prasarana dan sarana serta sumber dana yang memadai yang menunjang proses pelaksanaan pelayanan; d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; e. Peningkatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan; f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan. g. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 Pemerintah Kota Metro menetapkan visi yaitu **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”** bermakna Kota Metro yang mengimplementasikan integrasi teknologi informasi dan digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung oleh sumber daya manusia dengan kapabilitas unggul dan menunjukkan daya saing yang tinggi, dengan sektor jasa sebagai pilar utama ekonomi masyarakat dan tetap mengembangkan identitas serta kekayaan budaya lokal sebagai aset intelektual dan daya tarik tersendiri dalam menciptakan harmoni dan toleransi masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

Dalam mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, adaptif dan berkarakter;
- Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
- Misi 3 : Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya Saing;
- Misi 4 : Membangun insfrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan

berkelanjutan; dan

- Misi 5 : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Metro tersebut, maka Kecamatan Metro Barat sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur kewilayahan mengampu Misi Kedua dan Misi Kelima, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Tujuan : Terwujudnya kota cerdas.
Indikator : Indeks Implementasi Kota Cerdas.
Tujuan

Sasaran 2 : Terwujudnya layanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel sampai ke Kelurahan.

Indikator : Indeks Pelayanan Publik; dan
Sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat.
- b. Misi 5 : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata

Tujuan : Terciptanya harmoni sosial dan terwujudnya masyarakat berbudaya dalam memperkuat identitas daerah.

Indikator	:	Indeks Harmoni Indonesia.
Tujuan		
Sasaran 1	:	Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius
Indikator	:	Indeks Pemajuan
Sasaran 1	:	Kebudayaan; dan Indeks Trantibumlinmas.

Berdasarkan Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Kota Metro tersebut, maka Kecamatan Metro Barat merumuskan Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat”, dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat”

3.2 Sasaaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Tujuan Renstra yang akan dicapai, maka ditetapkan Sasaran Renstra sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel.

Indikator Sasaran 1 : Nilai SAKIP

2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indikator : Persentase penurunan
 Sasaran 1 gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Indikator : Persentase konflik sosial
 Sasaran 2 yang diselesaikan;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator : Tingkat Partisipasi
Sasaran 3 Lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan dalam
Pemberdayaan
Masyarakat.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 beserta tahapanya secara lengkap disajikan pada tabel 3.1 dan table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target TAHUN						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Visi : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius- Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius; Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata T5: Terciptanya harmoni	Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	83,94	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel	Nilai Sakip (Angka)	70.71	70.72	70.73	70.74	70.75	70.76	70.76	

sosial dan Terwujudnya masyarakat berbudaya dalam memperkuat identitas daerah Sasaran : S5.1: Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)(%)	30	35	40	30	45	50	55	
			Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.2				
Tahapan Renstra Kecamatan Metro Barat				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
-1	-2	-3	-4	-5
Peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan SDM Kecamatan melalui pelatihan atau workshop	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi	Terselenggaranya pelayanan berbasis digital	Tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel

3.3 Strategi Kecamatan Metro Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah -langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kecamatan Metro Barat ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal kekuatan dan kelemahan (*Strength- Weakness*) dan faktor eksternal peluang dan ancaman (*Opportunity- Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kecamatan Metro Barat adalah sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kuantitas SDM aparatur cukup terpenuhi; 2. Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana.	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan dan kelurahan; 2. Minimnya inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; 2. Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan layanan publik berbasis digital belum memadai.

PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 2. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat; 3. Penguatan peran Camat dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan; 4. Pemberdayaan masyarakat semakin meningkat; 5. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan; 6. Potensi Wisata di wilayah Kecamatan Metro Barat.	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1,2 – O1-3); 2. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan (S1,2 – O1-3); 3. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada petugas pelayanan dan masyarakat (S1,2 – O1-3); 4. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim serta peningkatan ekonomi dan daya saing (S1,2 – O4-5); 5. Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan (S1,2 – O4-5).	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi dan bimtek (W1,2 – O1-3); 2. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkala di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (W1-3 – O1-5); 3. Pemenuhan sarana dan prasarana berkualitas untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis IT yang tangkas, cepat, dan akuntabel (W3 – O1-3).

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dirumuskan Strategi Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan

- kepuasan masyarakat;
- 2) Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan yang maju dan mandiri;
 - 3) Penguatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan trantibum bersama stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Barat.

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Metro Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan optimalisasi Program dan Kegiatan dari Renstra Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 serta keterkaitan dengan RPJMD Pemerintah Kota Metro Tahun 2025-2029 dalam pencapaian Visi dan Misinya. Arah Kebijakan Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3				
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Metro Barat				
No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
1	Visi: Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima Tujuan: Terwujudnya Kota Cerdas Sasaran: S2.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat, dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan	Strategi: Optimalisasi teknologi informasi dalam mewujudkan Metro Kota Cerdas yang berorientasi hasil dan layanan pada segala aspek layanan publik serta tata kelola pemerintahan. Arah Kebijakan: a. Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi berbasis elektronik dan digital untuk mewujudkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel; b. Penguatan kapasitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja; c. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi; d. Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang adaptif, berdampak, dan berorientasi pada pelayanan publik prima; e. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah berdasarkan sasaran prioritas; f. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menerapkan efektivitas dan efisiensi anggaran prioritas; g. Memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua lapisan masyarakat, Mengurangi kesenjangan digital melalui program-program inklusif; h. Mendorong pendidikan dan pelatihan dalam bidang digital dan teknologi;	Mendorong dan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal; Memberikan reward kepada Pegawai Negeri Sipil yang rajin dan disiplin, dan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin PNS sesuai PP nomor 53 tahun 2010 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan SOP yang ada; Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan; Monitoring dan evaluasi berbagai program dan kegiatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; Mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat yang ada baik di Tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan;	

		i. Menetapkan kebijakan yang kuat terkait perlindungan privasi data dan keamanan siber, Mendorong praktik-praktik keamanan data yang tinggi di sektor bisnis dan pemerintah; j. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Mengembangkan aplikasi dan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan; k. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi; l. Meningkatkan SDI Kota Metro yang terintegrasi dengan Provinsi dan Nasional termasuk penyediaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah; m. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal dalam memberikan kemudahan serta meningkatkan investasi; n. Mendorong terbentuknya kelurahan dan Kecamatan Cerdas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.		
--	--	---	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Metro Barat selama 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerinta Kota Metro Tahun 2025-2029, guna menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Metro selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Metro Barat untuk priode tahun 2025-2029 penyajiannya sebagaimana terinci dalam tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1							
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Metro Barat							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima Tujuan: Terwujudnya Kota Cerdas Sasaran: S2.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan	T1				T1		Camat
	Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat				Indek kepuasan masyarakat		
		S.1			S.1.1		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel			Nilai SAKIP		
			O1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG.1.1	
				Terlaksana perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					OT1.1.1.2	SUBKEG. 1.1.1	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					OT1.1.1.3	SUBKEG. 1.1.2	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					OT1.1.1.4	SUBKEG. 1.1.3	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	
					OT1.1.1.5	SUBKEG. 1.1.4	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					OT1.1.1.6	SUBKEG. 1.1.5	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.2	OT1.1.2.1	KEG.1.2		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Kecamatan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	ADMINISTRASI KEUANGAN PERNGKAT DAERAH		
				OT1.1.2.1.1	SUBKEG. 1.2.1		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				OT1.1.2.1.2	SUBKEG. 1.2.2		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		
				OT1.1.2.1.3	SUBKEG. 1.2.3		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		
				OT1.1.2.1.4	SUBKEG. 1.2.4		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			OT1.1.1.3	OT1.1.3.1	KEG.1.3		
			Cakupan Administrasi Kecamatan	Cakupan administrasi umum kecamatan	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
				OT1.1.3.1.1	SUBKEG. 1.3.1		

					Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	
					OT1.1.3.1.1.2	SUBKEG. 1.3.2	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
					OT1.1.3.1.1.3	SUBKEG. 1.3.3	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					OT1.1.3.1.1.4	SUBKEG. 1.3.4	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					OT1.1.3.1.1.5	SUBKEG. 1.3.5	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			OT1.1.1.4	OT1.1.1.4		KEG.1.4	
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				OT1.1.1.4.1		SUBKEG. 1.4.1	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	
				OT1.1.1.4.2		SUBKEG. 1.4.2	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			OT1.1.1.5	OT1.1.1.5		KEG.1.5	
			Cakupan Penyediaan jasa Kantor	Cakupan Penyediaan Kebutuhan jasa Kantor		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				OT1.1.1.5.1		SUBKEG. 1.5.1	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				OT1.1.1.5.2		SUBKEG. 1.5.2	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	
				OT1.1.1.5.3		SUBKEG. 1.5.3	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Air dan Listrik	
			OT1.1.1.6	OT1.1.1.6	OT1.1.1.6	KEG.1.6	
			Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				OT1.1.1.6.1	OT1.1.1.6.1	SUBKEG. 1.6.1	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				OT1.1.1.6.2	OT1.1.1.6.2	SUBKEG. 1.6.2	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				OT1.1.1.6.3	OT1.1.1.6.3	SUBKEG. 1.6.3	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	S1.2						
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel						
		O1.2.1		OT1.2.1	OT1.2.1	PROG. 2	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			OT1.1.2.1	OT1.1.2.1	OT1.1.2.1	KEG.2.1	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				OT1.1.2.1.1	OT1.1.2.1.1	SUBKEG.2.1.1	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Koordinasi dan Sinerdi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	

					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait	
					OT1.1.2.1.2	SUBKEG.2.1.2	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				OT1.1.2.2	OT1.1.2.2	KEG.2.2	
				Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
					OT1.1.2.2.1	SUBKEG.2.2.1	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	
					OT1.1.2.2.2	SUBKEG.2.2.2	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	
				OT1.1.2.3	OT1.1.2.3	KEG.2.3	
				jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	
					OT1.1.2.3.1	SUBKEG.2.3.1	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan NonPerizinan	
		S1.3			S.2.1 Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat		
Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata Tujuan: Terciptanya Harmoni Sosial dan Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dalam Memperkuat Identitas Daerah		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan					
			O1.3.1		OT1.3.1	PROG. 3	

Sasaran: S5.1. Terciptanya Keharmonisan Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya Religius			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	PROGRAM PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kasi Kesra dan Kasi Ekonomi
				OT1.1.3.1	OT1.1.3.1	KEG.3.1	
			cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan		Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.1.1	SUBKEG.3.1.1	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.1.2	SUBKEG.3.1.2	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.1.3	SUBKEG.3.1.3	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.1.4	SUBKEG.3.1.4	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Kasi Kesra
				OT1.1.3.2	OT1.1.3.2	KEG.3.2	
			Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.2.1	SUBKEG.3.2.1	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.2.2	SUBKEG.3.2.2	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayarakatan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.2.3	SUBKEG.3.2.3	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga	Kasi Kesra

					Kemasyarakatan yang Disediakan	Kemasayarakatan	
					OT1.1.3.2.4	SUBKEG.3.2.4	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kasi Ekonomi
				OT1.1.3.3	OT1.1.3.3	KEG.3.3	
			Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.1	SUBKEG.3.3.1	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.2	SUBKEG.3.3.2	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.3	SUBKEG.2.3.3	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.4	SUBKEG.3.3.4	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.5	SUBKEG.3.3.5	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.6	SUBKEG.3.3.6	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kasi Kesra

					OT1.1.3.3.7	SUBKEG.3.3.7	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.8	SUBKEG.3.3.8	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui keidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.9	SUBKEG.3.3.9	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.10	SUBKEG.3.3.10	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.11	SUBKEG.3.3.11	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kasi Kesra
					OT1.1.3.3.12	SUBKEG.3.3.12	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kasi Kesra
	S1.4						
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat				S.2.2 Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat S.2.3 Persentase penurunan konflik social		
		O1.4.1			OC1.4.1	PROG. 4	
		Meningkatnya penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat			Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Pemerintahan

				OT1.1.4.1	OT1.1.4.1	KEG.4.1	
				Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					OT1.1.4.1.1	SUBKEG. 4.1.1	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					OT1.1.4.1.2	SUBKEG. 4.1.2	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama tokoh masyarakat	
	S1.5						
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat				S.2.2 Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat S.2.3 Persentase penurunan konflik social		
		O1.5.1			OT1.5.1	PROG. 5	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial masyarakat			Persentase konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra
				OT1.1.5.1	OT1.1.5.1	KEG.5.1	
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					OT1.1.5.1.1	SUBKEG. 5.1.1	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Penertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi Pemerintahan
					OT1.1.5.1.2	SUBKEG. 5.1.2	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras , dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Kesra
					OT1.1.5.1.3	SUBKEG. 5.1.3	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan	Kasi Pemerintahan

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket. Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KECAMATAN					8.638.240.43 9		8.983.061.89 3		9.325.151.999		9.468.337.488		9.668.453.994	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.244.168.68 9		4.687.023.38 8		4.915.258.18 7		4.945.176.19 4		4.977.235.44 8	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Angka	70,71	70,72	5.244.168.68 9	70,73	5.439.489.94 3	70,74						
									5.669.080.199	70,75	5.770.535.688	70,76	5.934.382.194	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen		8	18.688.600	8	18.688.600	8	18.688.600	8	18.688.600	8	18.688.600	
Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.688.600		18.688.600		18.688.600		18.688.600		18.688.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	1	3.149.600	1	3.149.600	1	3.149.600	1	3.149.600	1	3.149.600	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	4.774.500	1	4.774.500	1	4.774.500	1	4.774.500	1	4.774.500	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	4.884.400	1	4.884.400	1	4.884.400	1	4.884.400	1	4.884.400	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	2.643.700	1	2.643.700	1	2.643.700	1	2.643.700	1	2.643.700	Sub Bagian Keuangan
	Jumlah laporan evaluasi kinerja													

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah	laporan	1	1	3.236.400	1	3.236.400	1	3.236.400	1	3.236.400	1	3.236.400	Sub Bagian Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.875.972.567		5.071.293.821		5.300.884.077		5.402.339.566		5.566.186.072	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.875.972.567		5.071.293.821		5.300.884.077		5.402.339.566		5.566.186.072	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ 12 bulan	45	700	4.201.006.167	700	4.396.327.421	700	4.625.917.677	700	4.727.373.166		4.891.219.672	Sub Bagian Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	651.000.000	12	651.000.000	12	651.000.000	12	651.000.000	12	651.000.000	Sub Bagian Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	4	12.284.800	4	12.284.800	4	12.284.800	4	12.284.800	4	12.284.800	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	11.681.600	1	11.681.600	1	11.681.600	1	11.681.600	1	11.681.600	Sub Bagian Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah					174.132.300		174.132.300		174.132.300		174.132.300		174.132.300	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					174.132.300		174.132.300		174.132.300		174.132.300		174.132.300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	5	5	4.955.000	5	4.955.000	5	4.955.000	5	4.955.000	5	4.955.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	5	53.124.500	5	53.124.500	5	53.124.500	5	53.124.500	5	53.124.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	25.052.800	2	25.052.800	2	25.052.800	2	25.052.800	2	25.052.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	2	81.000.000	8	81.000.000	8	81.000.000	8	81.000.000	8	81.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					41.776.000		41.776.000		41.776.000		41.776.000		41.776.000	
Tersedianya barang milik daerah					41.776.000		41.776.000		41.776.000		41.776.000		41.776.000	

Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	2	5	18.176.000	5	18.176.000	5	18.176.000	5	18.176.000	5	18.176.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	3	23.600.000	3	23.600.000	3	23.600.000	3	23.600.000	3	23.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49.549.222		49.549.222		49.549.222		49.549.222		49.549.222	
Tersedianya kebutuhan jasa kantor					49.549.222		49.549.222		49.549.222		49.549.222		49.549.222	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	755	755	7.550.000	755	7.550.000	755	7.550.000	755	7.550.000	755	7.550.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	39.999.222	12	39.999.222	12	39.999.222	12	39.999.222	12	39.999.222	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang disediakan	laporan	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.050.000		84.050.000		84.050.000		84.050.000		84.050.000	
Terpeliharanya barang milik daerah					84.050.000		84.050.000		84.050.000		84.050.000		84.050.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	4	62.370.000	4	62.370.000	4	62.370.000	4	62.370.000	4	62.370.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	14	16	10.880.000	16	10.880.000	16	10.880.000	16	10.880.000	16	10.880.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	Seksi Pembangunan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					356.619.000		379.619.000		386.625.000		387.625.000		389.625.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	82	356.619.000	84	379.619.000	86	386.625.000	88	387.625.000	90	389.625.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					35.378.400		35.378.400		35.378.400		35.378.400		35.378.400	
Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					35.378.400		35.378.400		35.378.400		35.378.400		35.378.400	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah													

Vertikal Terkait	dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	Seksi Pembangunan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	1	1	24.878.400	1	24.878.400	1	24.878.400	1	24.878.400	1	24.878.400	Seksi Pembangunan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan					297.069.950		347.069.950		371.569.800		371.569.800		371.569.800	
Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan					297.069.950		347.069.950		371.569.800		371.569.800		371.569.800	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.069.500	1	3.069.500	1	3.069.500	1	3.069.500	1	3.069.500	Seksi Pemerintahan dan Trantib
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Ganjar Agung)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.150	12	86.000.150	12	92.125.112	12	92.125.112	12	92.125.112	Kelurahan Ganjar Agung
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Ganjar Asri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.300	12	86.000.300	12	92.125.262	12	92.125.262	12	92.125.262	Kelurahan Ganjar Asri
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Mulyojati)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	86.000.000	12	92.124.963	12	92.124.963	12	92.124.963	Kelurahan Mulyojati
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Mulyosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	86.000.000	12	92.124.963	12	92.124.963	12	92.124.963	Kelurahan Mulyosari
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7.152.900		7.152.900		7.152.900		7.152.900		7.152.900	
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7.152.900		7.152.900		7.152.900		7.152.900		7.152.900	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	laporan	1	1	7.152.900	1	7.152.900	1	7.152.900	1	7.152.900	1	7.152.900	Seksi Pemerintahan dan Trantib
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					2.675.970.700		2.645.970.700		2.696.970.700		2.738.700.700		2.774.970.700	

Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	2.675.970.700	100	2.645.970.700	100	2.696.970.700	100	2.738.700.700	100	2.774.970.700	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					837.964.400		807.964.400		858.964.400		900.694.400		936.964.400	
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan					837.964.400		807.964.400		858.964.400		900.694.400		936.964.400	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Ganjar Agung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Ganjar Agung
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Ganjar Asri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Ganjar Asri
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mulyojati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Mulyojati
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mulyosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Mulyosari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ganjar Agung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	10	10	149.964.400	10	135.440.287	10	145.940.300	10	145.940.300	10	145.940.300	Kelurahan Ganjar Agung
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ganjar Asri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	10	10	138.947.000	10	124.422.905	10	134.922.900	10	134.922.900	10	134.922.900	Kelurahan Ganjar Asri
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mulyojati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	10	10	166.300.000	10	151.775.904	10	162.275.900	10	162.275.900	10	162.275.900	Kelurahan Mulyojati
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mulyosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	10	10	166.300.000	10	151.775.904	10	162.275.900	10	162.275.900	10	162.275.900	Kelurahan Mulyosari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ganjar Agung)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ormas	1	1	50.000.200	1	50.000.200	1	50.000.200	1	50.000.200	1	50.000.200	Kelurahan Ganjar Agung

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ganjar Asri)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ ormas	1	1	61.052.800	1	61.052.800	1	61.052.800	1	61.052.800	1	61.052.800	Kelurahan Ganjar Asri
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mulyojati)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ ormas	1	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	Kelurahan Mulyojati
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mulyosari)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ ormas	1	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	Kelurahan Mulyosari
Evaluasi Kelurahan (Ganjar Agung)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Ganjar Agung
Evaluasi Kelurahan (Ganjar Asri)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Ganjar Asri
Evaluasi Kelurahan (Mulyojati)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Mulyojati
Evaluasi Kelurahan (Mulyosari)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Mulyosari
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300	
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300		1.143.286.300	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Ganjar Agung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	15	15	331.320.000	15	331.320.000	15	331.320.000	15	331.320.000	15	331.320.000	Kelurahan Ganjar Agung
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Ganjar Asri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	3	3	410.281.500	3	410.281.500	3	410.281.500	3	410.281.500	3	410.281.500	Kelurahan Ganjar Asri
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mulyojati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	3	3	209.520.000	3	209.520.000	3	209.520.000	3	209.520.000	3	209.520.000	Kelurahan Mulyojati
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mulyosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	25	25	163.690.000	25	163.690.000	25	163.690.000	25	163.690.000	25	163.690.000	Kelurahan Mulyosari
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LK	2	2	14.775.000	2	14.775.000	2	14.775.000	2	14.775.000	2	14.775.000	Seksi Kesra
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan	Unit	1	1	3.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	Seksi Kesra
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	1	1	9.999.800	1	9.999.800	1	9.999.800	1	9.999.800	1	9.999.800	Seksi Perekonomian
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					694.720.000		694.720.000		694.720.000		694.720.000		694.720.000	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					694.720.000		694.720.000		694.720.000		694.720.000		694.720.000	

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	25	16	157.100.000	16	157.100.000	16	157.100.000	16	157.100.000	16	157.100.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	25	16	223.400.000	16	223.400.000	16	223.400.000	16	223.400.000	16	223.400.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	25	16	150.560.000	16	150.560.000	16	150.560.000	16	150.560.000	16	150.560.000	Kelurahan Mulyojati

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	25	16	87.860.000	16	87.860.000	16	87.860.000	16	87.860.000	16	87.860.000	Kelurahan Mulyosari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	25	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	25	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	25	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	25	16	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	25	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	25	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	25	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	Kelurahan Mulyojati

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	25	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	16	6.800.000	Kelurahan Mulyosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	25	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	25	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Agung
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Ganjar Asri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyojati
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	25	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Mulyosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Agung
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Asri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyojati
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyosari

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyojati
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyosari
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyojati
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyosari
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Ganjar Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Agung

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Ganjar Asri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Ganjar Asri
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Mulyojati)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyojati
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Mulyosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	15	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	18	900.000	Kelurahan Mulyosari
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					18.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	30	35	18.000.000	40	38.000.000	45	40.000.000	50	40.000.000	55	40.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					18.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					18.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Ganjar Agung)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Kelurahan Ganjar Agung
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Ganjar Asri)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Kelurahan Ganjar Asri
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Mulyojati)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Kelurahan Mulyojati

Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Mulyosari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Kelurahan Mulyosari
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	0	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.400.000	1	4.400.000	Seksi Kesra
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Ganjar Agung)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	5.500.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kelurahan Ganjar Agung
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Ganjar Asri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	5.500.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kelurahan Ganjar Asri
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Mulyojati)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	5.500.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kelurahan Mulyojati
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Mulyosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	5.500.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kelurahan Mulyosari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					365.611.000		470.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%	100	100	365.611.000		470.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					360.500.000		470.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					360.500.000		470.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	50	50	11.500.000	50	11.500.000	50	11.500.000	50	11.500.000	50	11.500.000	Seksi Pemerintahan dan Trantib
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ganjar Agung)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	10 0	12.000.000	10 0	12.000.000	10 0	12.000.000	10 0	12.000.000	10 0	12.000.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ganjar Asri)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	20 0	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyojati)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	20 0	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	Kelurahan Mulyojati

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyosari)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	Kelurahan Mulyosari
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	50	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	Seksi Kesra
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Ganjar Agung)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	200	200	70.000.000	200	72.500.000	200	94.875.000	200	94.875.000	200	94.875.000	Kelurahan Ganjar Agung
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Ganjar Asri)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	200	200	73.000.000	200	75.500.000	200	97.875.000	200	97.875.000	200	97.875.000	Kelurahan Ganjar Asri
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Mulyojati)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	200	200	73.000.000	200	75.500.000	200	97.875.000	200	97.875.000	200	97.875.000	Kelurahan Mulyojati
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Mulyosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	200	200	71.000.000	200	73.500.000	200	95.875.000	200	95.875.000	200	95.875.000	Kelurahan Mulyosari
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Seksi Pemerintahan dan Trantib

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kecamatan Metro Barat sebagai perangkat daerah yang mampu bidang urusan/unsur kewilayahan telah melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah pada Kecamatan Metro Barat disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3				
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Metro Barat				
No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Keg 1	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Subkeg 1	
			Koordinasi dan Sinerdi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Keg 2	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

			Subkeg 2	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	
			Keg 3	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	
			Subkeg 3	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan NonPerizinan	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029, Kecamatan Metro Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Metro Barat yang merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2029, dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Barat dan Target Tahunan (2025-2030) beserta formulasi perhitungannya secara rinci tertuang dalam tabel 4.4 dan 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 4									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									
NO	Indikator	Satuan	Target TAHUN						Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	100	100	100	100	100	CAMAT
2	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	CAMAT

Tabel 4.5

Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI CAPAIAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Metro Barat). Hasil pengukuran berupa angka. Angka ditetapkan sebagai berikut:	Jumlah bobot1 Formula bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$ = $\frac{1}{9}$ = 0,11 Jumlah unsur9 Total dari nilai persepsi per unsur SKM unsur = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}}$ x Nilai penimbang (0,11) Total unsur terisi - Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM, hasil penilai tersebut di atas, dikonversikan dengan dasar 25, dengan rumus : SKM unit pelayanan x Nilai dasar (25) - Nilai indeks pelayanan = menjumlahkan SKM seluruh unsur - Nilai indeks pelayanan dalam 1 tahun : Jumlah total SKM unit pelayanan semester 1 + semester 2 2 (Jumlah semester dalam 1 tahun) Penetapan Jumlah Responden - Populasi : Total jumlah masyarakat penerima pelayanan dalam kurun waktu tertentu. - Sampel : Masyarakat penerima pelayanan yang diminta untuk memberikan	Indeks	100	100	100	100	100	100	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Metro Barat

			informasi atau tanggapan atas kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. - Besaran perhitungan sampel menggunakan tabal sampel dari <i>Krejcie and Morgan</i> sebagaimana tertuang pada Lampiran II Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.								
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta keharmonisan masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah indikator yang mengukur efektivitas upaya penyelesaian konflik sosial dalam suatu masyarakat atau organisasi, serta kinerja pemerintah atau lembaga terkait dalam mengelola dan menuntaskan berbagai perselisihan, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100 \%$	%	100	100	100	100	100	100	Data Konflik Sosial Kecamatan Metro Barat

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2015-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintah daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Metro Barat beserta formulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.6									
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
NO	Indikator	Satuan	Target TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP	Nilai	70,71	70,72	70,73	70,74	70,75	70,76	
2	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persen	30	35	40	45	50	55	

Tabel 4.7
Formulasi Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Barat Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD pada perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator AKIP perangkat daerah. Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan
2	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pemberdayaan masyarakat adalah ukuran atau derajat keterlibatan dan kontribusi aktif dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan dalam seluruh proses pemberdayaan masyarakat, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	Jumlah undangan Musrenbang Jumlah Peserta yang hadir di Musrenbang x100%	Musrenbang Tingkat Kecamatan
3	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah indikator yang mengukur seberapa besar pengurangan jumlah atau intensitas kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	jumlah kasus periode awal – jumlah kasus periode akhir jumlah kasus periode awal x 100%	Data trantibum Kecamatan

BAB V

PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029 . Strategis atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan rencana Strategis Pemerintah Kota Metro 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Metro Barat.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh Stakeholders yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Metro.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Misi Kota Metro, Insha Allah dapat tercapai dan pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Mulyajati, September 2025

Camat Metro Barat,



Triyono S.Sos

NIP. 19680722 199402 1 00